

**RESPONSIVITAS KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM
(STUDI KASUS PADA KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

DESTA PUTRI RIZKI

NPM 2116021064



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**RESPONSIVITAS KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM
(STUDI KASUS PADA KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh
DESTA PUTRI RIZKI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

RESPONSIVITAS KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM (STUDI KASUS PADA KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh
DESTA PUTRI RIZKI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam meningkatkan responsivitas BPBD Kota Bandar Lampung terhadap bencana alam. Sebagai wilayah yang rawan bencana, Kota Bandar Lampung telah mengalami sejumlah peristiwa banjir besar dalam beberapa tahun terakhir, yang menegaskan pentingnya respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Kepala BPBD memainkan peran strategis dalam tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat BPBD dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala BPBD sangat memengaruhi tingkat responsivitas lembaga, terutama dalam perumusan kebijakan, koordinasi lintas instansi, dan optimalisasi sumber daya. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana dan mengurangi kerentanan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Kepemimpinan, BPBD, Responsivitas, Penanggulangan Bencana, Kota Bandar Lampung

***" The Responsiveness of the Chief Executive of the Regional Disaster
Management Agency in Responding to Natural Disasters"
(A CASE STUDY IN BANDAR LAMPUNG CITY)***

By
DESTA PUTRI RIZKI

Abstract

This study aims to analyze the role of the Head of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in improving the responsiveness of BPBD in Bandar Lampung City to natural disasters. Bandar Lampung, as a disaster-prone area, has experienced significant flood events in recent years, highlighting the urgency of rapid, coordinated, and effective disaster response. Using a descriptive qualitative method, this research explores how the Head of BPBD plays a strategic role in the preparedness, emergency response, and post-disaster recovery phases. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving BPBD officials and affected communities. The findings indicate that the leadership of the BPBD Head significantly influences the institution's responsiveness, particularly in policy formulation, inter-agency coordination, and resource optimization. The study also identifies several challenges, such as limited human resources, infrastructure, funding, and public awareness. Therefore, adaptive and collaborative leadership is key to enhancing disaster management performance and reducing community vulnerability in Bandar Lampung.

Keywords: Leadership, BPBD, Responsiveness, Disaster Management, Bandar Lampung City

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **RESPONSIVITAS KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Desta Putri Rizki**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021064**

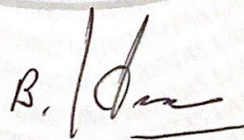
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

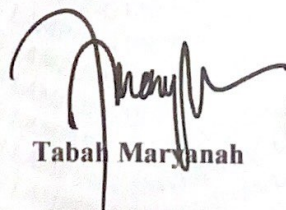
1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

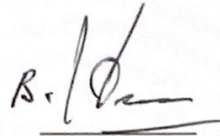


Tabah Maryanah

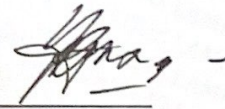
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.**



Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760824120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Agustus 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Desta Putri Rizki
NPM 2116021064

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Destia Putri Rizki dilahirkan di Karang Rejo pada tanggal 22 November 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Putri dari Bapak Tugiran dan Ibu Tuginem. Memiliki satu orang kakak bernama Puspita Dewi.

Jenjang pendidikan yang pernah penulis tempuh dimulai dari dari Taman Kanak-kanak (TK) Kartika tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Karang Rejo tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Utama tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebangsaan Kalianda Lampung Selatan tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non akademik dalam usaha menunjang kapasitas diri. Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi maupun magang diantaranya HMJ Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Biro 3 Minat Bakat dan Kerohanian, kemudian dipercaya menjadi Sekertaris Umum HMJ Ilmu Pemerintahan.

Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 38 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan KKN di Desa Adi Luhur, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji dan berkesempatan melakukan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

" Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."

(Q.S Al-Mujadalah: 58:11)

“Perjuangan harus berlandaskan keimanan dan keikhlasan, bukan sekadar ambisi semata”

(Lafran Pane)

“ Kamu tidak akan pernah kalah, selama tidak menyerah.”

(Pidi Baiq)

“Hidup ini sejatinya sederhana. Kita yang membuatnya rumit dengan ambisi dan rasa iri”

(Tere Liye)

“Mimpi tanpa usaha adalah omong kosong, usaha tanpa mimpi adalah kebodohan”

(W.S. Rendra)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin, telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Teriring Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orang Tua Ku Bapak Tersayang

Tugiran

Ibu Tersayang

Tuginem

Kakak

Puspita Dewi

Serta Nenek Tercinta

Terimakasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepadaku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

Kepada teman-teman seperjuangan dan Kepada Almamater yang Penulis cintai dan banggakan Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “RESPONSIVITAS KEPALA PELAKSANA BPBD DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM STUDI KASUS PADA KOTA BANDAR LAMPUNG”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “RESPONSIVITAS KEPALA PELAKSANA BPBD DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM STUDI KASUS PADA KOTA BANDAR LAMPUNG”. sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Tabah Maryanah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Budi Harjo, S. Sos., M. IP., selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya baik dalam hal akademik maupun non akademik, terimakasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT
8. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan banyak kritik, saran dan masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai di posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT
10. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Mba Shela dan Bu Merta. Terima Kasih sudah mau direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;

11. Seluruh Jajaran Sekretariat BPBD Kota Bandar Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman selama penulis melaksanakan kegiatan magang dan melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini saya haturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Wakhidi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Bunda Rara selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Mba Indri, Mba Sinta, Mba Debby, selaku Staff Sekretariat, telah memberikan pelajaran baru dan warna di hari-hari penulis menjalani PKL. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
12. Terima kasih kepada seluruh Informan yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi, semoga Bapak/Ibu sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT;
13. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu tercinta atas segala dukungan, kasih sayang, serta kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Tanpa doa, bimbingan, dan pengorbanan Bapak dan Ibu, saya tidak akan mampu melewati berbagai tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir dan meraih gelar sarjana. Segala motivasi, perhatian, dan nasihat yang diberikan menjadi kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Bunda.
14. Terimakasih kepada kakak tercinta Puspita Dewi dan Keponakan Tersayang Abbiyan Arrayan Rasyid yang selalu menyemangati penulis, yang selalu mengerti keadaan saya, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT
15. Terimakasih Kepada Nenek yang telah memberikan semangat baik kata-kata maupun materi, semoga nenek diberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta Panjang umur agar mampu melihat cucunya sukses di masa mendatang;

16. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat yang telah diberikan, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
17. Kepada seseorang yang tak kalah penting bagi penulis, Fahrurrozi, S.Ars. terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam proses penulisan skripsi ini, baik waktu maupun tenaga . Telah mendengar, menghibur maupun mendengar keluh kesah penulis. Terimakasih telah menjadi rumah yang tak berbentuk bangunan.
18. Kepada para sahabatku, Vania, Ira, Sisy, Jahdir, Biya, Nita, Bela, Mojel, Piwa, Bisma, Dika, Fairuz, Gipari, Fajri, Rafli, Aryo, dan Wahyu, Intan, Tarina, Rahel, Refina. yang telah menjadi sahabat sejati selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas rasa sayang, dukungan, dan kesediaan kalian untuk selalu berbagi keluh kesah serta suka duka bersama. Kehadiran kalian telah mewarnai hari-hariku dan memberikan semangat dalam menjalani proses perkuliahan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalani kehidupan, dan dapat meraih seluruh cita-cita yang kita impikan serta jalan jalan bersama keseluruhan penjuru negeri. Terima kasih telah beriringan bersama dalam perjalanan ini, semoga persahabatan kita terus terjaga dan membawa kebaikan bagi masa depan kita semua.;
19. Kepada Arek Reborn, Wawa, Vriska, Alfi, Dona, Yumna, Deswita, Rifa, terimakasih sudah menemani penulis sejak awal bangku sekolah menengah atas sampai sekarang semoga kita semua diberikan Kesehatan, rezeki yang berlimpah serta karir yang bersinar dimanapun kita berada;
20. Kepada teman MBKM penelitian BPBD Kota Bandar Lampung Ellia Rossa Terima kasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup Penulis dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga hubungan kita akan selalu terjalin;
21. Kepada teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya teman-teman angkatan 2021, terima kasih telah memberi warna dalam proses perkuliahan penulis, semoga hubungan pertemanan kita tetap terjalin,

22. Dan yang terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri “Desta Putri Rizki”. Terima kasih sudah menyelesaikan tanggung jawab ini, terima kasih sudah melawan segala perasaan selama proses mengerjakan tugas akhir. Terimakasih untuk tetap tegak berdiri menyelesaikan kewajibanmu di tengah banyaknya cobaan yang datang. Terima kasih ya sudah berjuang untuk sampai di titik ini, semoga tetap rendah hati karena perjuanganmu mewujudkan cita cita.

23. Bandar Lampung, 04 Agustus 2025

24. Penulis

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31. Desta Putri Rizki

32. NPM 2116021064

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	5
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Batasan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
II TINJAUAN TEORI	10
2.1 Pengertian Responsivitas.....	10
2.1.1 Definisi Responsivitas.....	11
2.2 Dasar Hukum BPBD	12
2.2.1 Responsivitas BPBD	14
2.2.2 Indikator Responsivitas Dalam Penanggulangan Bencana	16
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Responsivitas	17
2.3 Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Bandar Lampung	19

2.3.1	Tantangan Dan Kendala Penanggulangan Bencana Di Kota Bandar Lampung	19
2.4	Kerangka Pikir.....	23
III	METODE PENELITIAN	25
3.1	Tipe Penelitian.....	25
3.2	Lokasi Penelitian	26
3.3	Fokus Penelitian	27
3.4	Sumber Data	27
3.5	Informan Penelitian	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data	28
3.7	Teknik Pengelolaan Data.....	30
3.8	Teknik Penyajian Data	31
3.9	Teknik Validasi Data.....	33
IV	GAMBARAN UMUM	35
4.1	Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	35
4.2	Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung.....	38
4.2.1	Struktur Organisasi BPBD	39
4.2.2	Peran Kepala Pelaksana BPBD	40
4.3	Konsep Dan Teori Pelayanan Publik.....	43
4.3.1	Pengertian Pelayanan Publik.....	43
4.3.2	Konsep Pelayanan Publik.....	44
4.3.3	Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.....	45
4.3.4	Asas-Asas Pelayanan Publik.....	48
4.3.5	Unsur-Unsur Pelayanan Publik.....	48
4.3.6	Kualitas Pelayanan Publik.....	49

4.3.7	Responsivitas Pelayanan Publik.....	51
4.4	Tugas Kepala Pelaksana BPBD.....	51
V	HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1	Hasil Penelitian.....	54
5.1.1	Tahap Kesiapsiagaan.....	54
5.1.2	Tahap Tanggap Darurat.....	68
5.1.3	Tahap Pasca Bencana	82
5.2	Upaya Peningkatan Responsivitas BPBD Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Bencana Alam	92
5.3	Temuan Utama Penelitian	94
5.3.1	Rekomendasi Strategis	97
VI	KESIMPULAN DAN SARAN	98
6.1	Kesimpulan.....	98
6.2	Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN.....	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir	25
Gambar 2 Peta Administratif Kota Bandar Lampung 2015.	35
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Informan Penelitian	28
Tabel 2 Kondisi Demografi Kota bandar Lampung 2024	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Transkrip
Wawancara.....	110
Lampiran 2	
Dokumentasi.....	127

DAFTAR SINGKATAN

BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
SATKORLAK	: Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana
SATLAKPB	: Satuan Pelaksana Penanganan Bencana
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
SDM	: Sumber Daya Manusia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
TRC	: Tim Reaksi Cepat
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPD	: Sistem Peringatan Dini

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik atau masyarakat berkaitan dengan bidang kehidupan yang meluas. Pelayanan publik yaitu setiap pelayanan yang diberikan dengan wujud fisik maupun sebagai pelayanan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau sebagai bagian menjalani tugas dan kewajibannya.

Dalam kehidupan bernegara, tugas pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik yang diperlukan bagi masyarakat, dimulai dengan pelayanan berupa peraturan dan pelayanan lain yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada awal tahun 1990-an, berbagai gerakan reformasi publik di negara-negara industri dipengaruhi oleh tekanan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang disampaikan oleh pemerintah. pasal 25 undang-undang pelayanan publik nomor 2009 menyebutkan bahwa masyarakat berhak menerima layanan yang baik dan sejalan dengan prinsip serta tujuan pelayanan.

Hal terpenting dalam melayani publik adalah meningkatkan kualitas layanan tersebut. Kualitas pelayanan sebenarnya berpihak pada beberapa aspek, terutama model pelaksanaan (manajemen), tenaga kerja, dan dukungan institusional. Dalam konteks ini tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu layanan publik termasuk dalam bidang penanggulangan bencana.

Mitigasi bencana adalah urutan kegiatan atau Tindakan yang mencakup perumusan kebijakan pembangunan, tanggap darurat, dan pemulihan (pasca bencana) terhadap bencana alam dan daerah rawan bencana. UU No. 24/2007, tujuan peraturan kebencanaan adalah untuk menyelamatkan warga dari bahaya alam, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga penanganan bencana dengan menyeluruh, terkoordinasi, dan terencana, menumbuhkan keikutsertaan dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, menghormati kearifan lokal, menumbuhkan semangat kerjasama, solidaritas, dan kemurahan hati, dan

menghasilkan kedamaian dalam bermasyarakat, berkebangsaan dan berpatriotisme. Berdasarkan target di atas, maka pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin perlindungan yang efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana, terutama dalam menanggulangi bencana alam.

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut: bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007).

Respon yang baik dari kepala pelaksana BPBD diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari bencana alam. menurut Utari (2018) Ratminto dan Winarsih, responsivitas mengacu pada kemampuan menyediakan layanan untuk mengetahui keinginan masyarakat, menentukan rencana dan prioritas layanan, serta mengembangkan program layanan yang memenuhi keperluan dan keinginan masyarakat. Menurut (Dwiyanto, 2017; Hobolt dan Klemmensen, 2008) responsivitas mengacu pada kemampuan suatu pemerintah atau organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan dan penyediaan pelayanan publik.

Berdasarkan teori responsivitas diatas, diinginkan institusi penanggulangan bencana alam dapat memberikan penanganan yang terbaik sesuai kebutuhan masyarakat sehingga dampak negatif dari bencana alam dapat diatasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Permendagri nomor 46, terutama berdasarkan 5 instruksi organisasi dan tata kerja kantor bencana daerah, dan berdasarkan Perka BNPB nomor 3 tahun 2008, tentang operasional instruksi. Beda dengan BNPB sebagai lembaga pusat

bencana, BPBD ialah organisasi khusus yang mengelola mitigasi bencana daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-undang Penanggulangan Bencana Alam tanggal 24 November 2007, diharapkan penanggulangan bencana alam di daerah dapat lebih efisien dan efektif.

BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana demikian halnya dengan pemerintah kota Bandar Lampung juga telah memiliki BPBD.

Sepanjang tahun 2024, tercatat beberapa peristiwa bencana alam yang signifikan terjadi di Kota Bandar Lampung. Pada 24 Februari 2024, enam kecamatan terdampak banjir parah akibat curah hujan ekstrem yang mengakibatkan tinggi air mencapai 1,5 meter. Tak lama berselang, pada 12 April 2024, banjir kembali melanda tiga kecamatan lain dengan ketinggian air mencapai 1 meter. (penanggulangankrisis.kemkes.go.id).

Dalam dua tahun terakhir, kota Bandar Lampung mengalami beberapa kali bencana banjir yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Pada 24 Februari 2024, banjir bandang melanda Kota Bandar Lampung dan mengakibatkan dampak signifikan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Rajabasa (kelurahan Rajabasa Nunyai dan kelurahan Rajabasa), Langkapura, Way Halim, Kedamaian, Kemiling, dan Teluk Betung Selatan (Oktavia, 2024). Air mencapai ketinggian 1 hingga 2 meter, sehingga membuat ratusan rumah terendam dan memaksa sekitar 150 warga mengungsi di masjid Nurussalam. sebanyak 160 rumah warga terdampak, dan fasilitas publik seperti rumah sakit Urip Sumoharjo, masjid, dan kampus swasta juga terdampak, dengan puluhan sepeda motor di halaman rumah sakit roboh diterjang banjir. Pada 16 november 2024, banjir juga melanda beberapa titik di kota Bandar Lampung, dengan salah satu lokasi terdampak berada di kelurahan Way Dadi, kecamatan Sukarame (bpbd.bandarlampungkota.go.id). Banjir tersebut

disebabkan oleh hujan deras. Akibat kejadian ini, terjadi kerusakan pada rumah warga dan BPBD melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak.

Selain itu, bencana alam tanah longsor juga terjadi di kelurahan Gedong Air pada 16 november 2024, yang merusak dua rumah warga. BPBD merespons dengan menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC), tetapi keterbatasan alat dan medan menjadi hambatan dalam proses penanganan awal. Sebagai lembaga penanggulangan bencana tingkat daerah. BPBD berfungsi dan bertanggung jawab dalam kesiapsiagaan sebelum bencana, tindakan darurat saat bencana terjadi, hingga pemulihan pascabencana.

Rentetan kejadian ini menunjukkan bahwa bencana di kota Bandar Lampung bersifat berulang dan sistemik, Dalam konteks inilah responsivitas kepala pelaksana BPBD menjadi sangat penting. Menurut peraturan walikota Bandar Lampung nomor 69 tahun 2021, Sebagai pimpinan lembaga penanggulangan bencana di daerah, kepala pelaksana bertanggung jawab penuh atas koordinasi, pengambilan keputusan darurat, pengalokasian sumber daya, hingga pelaksanaan program mitigasi jangka panjang.

Namun, beberapa evaluasi pasca bencana mengungkapkan bahwa respon BPBD belum sepenuhnya optimal. Keterlambatan distribusi bantuan, kurangnya sinkronisasi data, hingga minimnya keterlibatan masyarakat dalam sistem peringatan dini menjadi sorotan dari berbagai pihak, termasuk media, LSM, dan warga terdampak. Efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada respon yang cepat dan terkoordinasi untuk mengurangi dampak yang lebih luas. Dalam hal ini, Kepala Pelaksana memegang peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana terlaksana dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan urgensi tersebut, respon dari kepala pelaksana BPBD sangat lah vital, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai respon Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi bencana, termasuk strategi yang diambil, kendala yang dihadapi, dan efektivitas dari sistem yang dijalankan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kapasitas kelembagaan dalam konteks kebencanaan serta memberikan masukan terhadap

peningkatan sistem tanggap darurat dan manajemen risiko bencana di tingkat daerah.

1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian, penulis memanfaatkan tinjauan literatur dan studi terdahulu untuk mempermudah analisis terhadap dinamika atau fenomena yang terjadi di instansi. Referensi tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif komparatif terhadap temuan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan landasan teoretis dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Kurnia Ramadhan (2016) meneliti "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana di Kota Bandar Lampung" dengan tujuan menganalisis peran BPBD serta faktor penghambat dalam pencegahan bencana. Penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif (studi kepustakaan) serta empiris (berbasis data lapangan). Hasil penelitian yakni BPBD menjalankan pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana, namun pencegahan banjir masih minim karena terjadi setiap tahun. Hambatan utama dalam pencegahan bencana adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi.
2. Akta Surya Rahma Kenyo Hidayat (2023) meneliti "Evaluasi Ketanggapan BPBD dalam Mitigasi Bencana Angin Kencang di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur" dengan tujuan menganalisis responsivitas, hambatan, dan upaya BPBD. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu BPBD merespons bencana secara cepat, tepat, dan sopan, meskipun terkendala oleh keterbatasan jumlah posko siaga. Masyarakat tetap menilai kinerja BPBD memuaskan, didukung oleh sistem kerja Pusdalops 24 jam dan prosedur yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo.

3. Irfan, Bustami, & Alfi. (2023). Dengan judul “Analisis Responsivitas BPBD dalam Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Timur” Tujuan penelitian menganalisis sejauh mana responsivitas BPBD dalam menangani banjir di Kabupaten Aceh Timur, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses penanggulangan bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasilnya, BPBD Aceh Timur menerapkan prinsip-prinsip responsivitas yang meliputi koordinasi, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana banjir. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor pendukung, sementara keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat.
4. Kiki Rahmadani (2023) meneliti "Responsivitas BPBD dalam Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Medan" dengan tujuan mendeskripsikan responsivitas BPBD dalam menangani bencana banjir. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menunjukkan BPBD Kota Medan cukup responsif dalam menangani banjir dengan membentuk Keltana, menyediakan jalur evakuasi, dan mendirikan posko siaga. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, kurangnya interaksi dua arah dengan masyarakat, serta lambatnya respons di beberapa wilayah.
5. Muhammad Ardyansyah Hardianto (2023) meneliti "Responsivitas BPBD dalam Penanganan Darurat Angin Kencang di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur", bertujuan untuk menggambarkan tingkat responsivitas BPBD dalam penanganan dampak bencana angin kencang. Penelitian ini didasarkan pada paradigma kualitatif dimana sumber data utama berasal dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa BPBD Kabupaten Bondowoso memiliki kapasitas respons yang cepat dan efektif dalam menangani laporan bencana, meskipun penanganannya belum maksimal akibat kurangnya pemanfaatan sumber daya. Kesimpulannya,

BPBD dinilai mampu merespons secara cepat dan efektif, meminimalisir dampak bencana, serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, sebagaimana tercermin dalam hasil survei kepuasan masyarakat.

6. Putri, H. S., Sagita, A., & Ulvia, H. (2024). Dengan judul “Responsivitas BPBD dalam menangani keluhan bencana banjir di Kota Tanjungpinang.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami kapasitas respons BPBD dalam penanganan banjir di Tanjungpinang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian berfokus pada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Bidang Logistik sebagai informan utama. Hasil penelitian yaitu meskipun BPBD telah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani bencana banjir, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi layanan. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah pendistribusian logistik yang lambat akibat jalanan sulit diakses, terbatasnya sumber bantuan, pelayanan evakuasi yang belum memadai, dan penyaluran bantuan yang terhambat. Meskipun demikian, BPBD Kota Tanjungpinang telah menunjukkan respons yang cepat dan tanggap dalam beberapa kasus, seperti penyaluran bantuan logistik ke wilayah terdampak banjir.

Penelitian ini menunjukkan kemiripan dan perbedaan komparatif dengan studi terdahulu. Persamaan utama terletak pada fokus analisis terhadap responsivitas BPBD sebagai institusi penanggulangan bencana. Seluruh penelitian sebelumnya membahas bagaimana BPBD menjalankan perannya dalam menanggulangi bencana melalui berbagai langkah strategis, termasuk respons cepat, penanganan darurat, serta pencegahan. Penelitian ini mengadopsi pola metodologi serupa dengan penelitian terdahulu berupa pendekatan kualitatif berbasis wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait mekanisme responsivitas BPBD dalam menghadapi bencana di berbagai daerah.

Sementara itu, perbedaan utama adalah fokus penelitian yang secara khusus menyoroti Responsivitas Kepala Pelaksana BPBD dalam menanggulangi bencana alam di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada responsivitas BPBD secara umum di berbagai daerah. Selain itu,

objek penelitian dalam penelitian ini adalah BPBD Kota Bandar Lampung, sementara penelitian terdahulu dilakukan di berbagai wilayah seperti Medan, Aceh Timur, Bondowoso, Sidoarjo, dan Tanjung Pinang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi akademik yang lebih spesifik dalam mengkaji hubungan antara kepemimpinan dan responsivitas dalam manajemen bencana.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Responsivitas Kepala Pelaksana BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Di Kota Bandar Lampung?”

1.4 Batasan Masalah

Batasan permasalahan dalam Penelitian ini yaitu mengenai semua data dan teori pendukung, serta analisa terkait “Responsivitas kepala Pelaksana BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Bandar Lampung.”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah untuk “Mengidentifikasi dan Menjabarkan Responsivitas Kepala Pelaksana BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Bandar Lampung”.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis memberikan sumbangan pengetahuan baru, khususnya dalam kajian Responsivitas Kepala Pelaksana BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Bandar Lampung, serta

memperkaya literatur yang ada terkait dengan penanggulangan bencana Alam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis berfokus pada aplikasi langsung yang dapat digunakan oleh badan penanggulangan bencana (seperti Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, pemerintah daerah, anggota BPBD dan masyarakat) untuk meningkatkan responsivitas yang efektif terhadap bencana alam di Kota Bandar Lampung.

II TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Responsivitas

Responsivitas atau biasa disebut dengan daya tanggap adalah kemampuan para birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Rendahnya kemampuan para aparat birokrasi dalam merespon pelayanan dapat menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap birokrasi tersebut.

Menurut Dwiyanto (2006:148) responsivitas sebagai kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Hormon (1995) responsivitas (responsiveness) adalah kemampuan pemerintah (organisasi) untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut (Hardiansyah, 2018) menyatakan responsivitas bertujuan mengukur kemampuan para penyedia layanan terhadap kebutuhan, keinginan, harapan, aspirasi maupun tuntutan penerima layanan.. Responsivitas dari pemberi layanan dapat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Baik atau buruknya respon terhadap pelanggan dapat mencerminkan bagaimana kualitas kinerja pemberi layanan itu sendiri.

Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Responsivitas mengacu pada keselarasan antara program kegiatan pelayanan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah

ditunjukkan dengan adanya ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Secara otomatis kinerja organisasi tersebut dapat dikatakan buruk. Hal ini jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi, ada 4 indikator responsivitas menurut Hardiansyah (2015) Sebagai berikut:

1. Kemampuan Merespon

kemampuan merespon adalah salah satu hal yang paling penting dalam resposivitas pelayanan, kesiapan bertindak dan ketulusan dalam memberikan pelayanan harus di dahulukan.

2. Kecepatan Melayani

kecapatan merupakan target waktu pelayanan yang dapat di selesaikan dengan Tindakan berdasarkan dengan SOP yang berlaku.

3. Ketepatan Melayani

ketepatan melayani ialah tidak terjadi kesalahan dalam memberikan pelayanan artinya berkaitan dengan sesuai prosedur dan juga ketepatan biaya.

4. Ketepatan Waktu Melayani

ketepatan waktu yang di maksud ialah memebrikan pelayanan dengan dengan waktu yang tepat tidak menunda nunda pelayanan sehingga mampu membrikan kepastian dalam memberikan pelayanan.

2.1.1 Definisi Responsivitas

Menurut Sugiandi dalam Herdini dan Widiyarta(2020), Responsivitas merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparaturnegara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan.

Zeithaml, dkk dalam Rismawati, dkk (2015) menjelaskan secara rinci dan menyebutkan bahwa responsivitas termasuk ke dalam salah satu dimensi kualitas pelayanan publik, dimana dalam responsivitas sendiri terdiri dari atas beberapa indikator, yaitu:

1) Kemampuan Merespon Masyarakat

Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu sebagai petugas layanan harus mengetahui bagaimana agar dapat bersikap dan berkomunikasi dengan baik dan sopan terhadap masyarakat.

2) Kecepatan Melayani

Pelayanan yang cepat dimaksudkan dengan meliputi kesigapan dan ketulusan petugas dalam menjawab pertanyaan atau permintaan dari masyarakat.

3) Ketepatan Melayani

Pelayanan dengan tepat yaitu dalam melayani jangan sampai terjadi kesalahan baik dalam hal pekerjaan maupun pembicaraan, dalam artian ini pelayanan yang diberikan oleh petugas harus sesuai dengan keinginan masyarakat.

4) Kecermatan Melayani

Kecermatan dalam memberikan pelayanan perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan masyarakat. Pelayanan dengan cermat yaitu petugas selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam melakukan penyampaian pelayanan serta dalam melayani kebutuhan masyarakat.

5) Ketepatan Waktu Pelayanan

Maksud dari pelayanan dengan waktu yang tepat yaitu petugas dalam melayani masyarakat diharapkan pelaksanaan pelayanannya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

6) Kemampuan Menanggapi Keluhan

Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik wajib dalam menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan maupun keluhan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan agar supaya pelanggan dapat memperoleh kepastian waktu pelayanan yang akan diterimanya.

2.2 Dasar Hukum BPBD

BPBD merupakan 13espons pemerintah daerah yang berkedudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berfokus pada koordinasi serta pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana (Ladira, 2022). BPBD dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 sebagai pengganti SATKORLAK (Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana) di tingkat provinsi dan SATLAKPB (Satuan Pelaksana Penanganan Bencana) di kabupaten/kota. Kelembagaan sebelumnya diinisiasi berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2005 sebelum dilakukan reformasi struktural (Sari, 2023). Pembentukan BPBD dilakukan melalui koordinasi dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan pengesahan peraturan daerah, sesuai 13espons Pasal 63 Perpres No. 8/2008 tentang kelembagaan bencana (Puspita & Sembiring, 2024).

Secara yuridis, Pasal 18 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk membentuk BPBD sebagai institusi penanggulangan bencana di wilayah administrasinya. Kelembagaan ini tersruktur dalam dua level hierarkis, yakni tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Sucipto, 2019). Secara struktural, BPBD provinsi dikepalai oleh pejabat setingkat di bawah gubernur, sementara BPBD pada tingkat kabupaten/kota dikepalai pejabat satu tingkat di bawah bupati atau wali kota (Sari, 2023). Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Di Kota Bandar Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPBD Kota Bandar Lampung. Berdasarkan peraturan tersebut, BPBD ditetapkan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi penanganan bencana dan mitigasi dampak yang timbul. Selain itu, berdasarkan pasal 2 pada peraturan tersebut, sebagai instansi teknis khusus pemerintah daerah, BPBD memiliki 13espons utama dalam penanggulangan bencana dengan struktur organisasi yang berada dalam hierarki langsung di bawah otoritas eksekutif Walikota.

Menurut Kusumasari dalam Harmain (2021), pembentukan BPBD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. BPBD memiliki peran utama dalam mengidentifikasi wilayah rentan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta

memberikan panduan mitigasi. Selain itu, BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan peringatan dini, pelatihan pertolongan pertama, edukasi bencana, serta penentuan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian guna memastikan kesiapan menghadapi bencana.

Dengan berbagai tugas dan fungsinya, BPBD menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di daerah. Keberadaannya tidak hanya berfokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan pascabencana. Optimalisasi peran BPBD, baik dari segi kebijakan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana. Dengan koordinasi yang baik antara BPBD, pemerintah pusat, serta masyarakat, diharapkan efektivitas penanggulangan bencana dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

2.2.1 Responsivitas BPBD

Responsivitas merupakan kemampuan suatu organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda serta prioritas layanan, dan merancang program pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat (Pratmo, dkk., 2020). Menurut Fitriadi dalam Putri, Sagita & Ulvia (2024), responsivitas merupakan konsep yang menggabungkan kompetensi 14espons dalam merespons dan mengantisipasi masukan, peristiwa, tantangan, serta informasi baru, sehingga pemerintah dapat bertindak cepat dan tidak tertinggal dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai penyedia layanan. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa responsivitas merupakan kemampuan organisasi atau 14espons pemerintah dalam mengenali dan merespons kebutuhan, aspirasi, serta tuntutan masyarakat secara cepat dan tepat. Responsivitas juga mencerminkan kompetensi dalam mengantisipasi berbagai perubahan serta tantangan guna memastikan pelayanan publik yang efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Responsivitas BPBD berarti kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengenali, merespons, dan mengantisipasi berbagai kebutuhan, aspirasi,

serta tuntutan masyarakat terkait penanggulangan bencana secara cepat dan tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, proses penanganan bencana dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yakni:

- 1) Tahap sebelum terjadinya bencana (prabencana).
- 2) Tahap ketika bencana terjadi dan memerlukan 15esponsi darurat (tanggap darurat); serta
- 3) Tahap setelah bencana terjadi yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi (pascabencana).

Responsivitas BPBD mencakup seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana. Pada tahap prabencana, BPBD harus mampu mengenali potensi bencana serta melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa dalam kondisi normal (tidak terjadi bencana), pelaksanaan penanggulangan bencana mencakup: perencanaan upaya mitigasi, reduksi risiko secara sistematis, implementasi 15espons-langkah pencegahan, pengintegrasian program penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan wilayah, kewajiban melakukan kajian risiko bencana, penerapan kebijakan tata ruang berbasis risiko, penyelenggaraan program edukasi dan pelatihan kebencanaan, serta penerapan standar teknis yang berlaku dalam penanganan bencana. Selanjutnya, dalam tahap tanggap darurat, responsivitas BPBD terlihat dari kecepatan dan ketepatan dalam merespons bencana yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 48, kegiatan pada tahap ini meliputi penilaian cepat terhadap lokasi, tingkat kerusakan, dan sumber daya yang tersedia; penetapan status darurat bencana; pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan bagi kelompok rentan; serta pemulihan segera infrastruktur dan fasilitas vital. Setelah bencana berlalu, BPBD juga harus 15esponsive dalam tahap pascabencana, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi wilayah terdampak ke keadaan normal atau lebih baik. Berdasarkan Pasal 57, tahap pascabencana terdiri atas dua aspek utama, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, responsivitas BPBD tidak hanya terbatas pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan sebelum

bencana serta upaya pemulihan pascabencana untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

2.2.2 Indikator Responsivitas Dalam Penanggulangan Bencana

Responsivitas menjadi salah satu prinsip utama dalam mengevaluasi kinerja institusi, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Konsep ini merepresentasikan kemampuan organisasi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, menentukan agenda dan prioritas layanan, serta merancang program pelayanan yang selaras dengan aspirasi dan ekspektasi publik. Sebagai indikator kinerja, responsivitas mengukur seberapa baik lembaga publik mampu merealisasikan visi dan misinya, utamanya dalam menjawab tuntutan masyarakat secara efisien dan responsif (Manik, 2019). Dengan demikian, responsivitas tidak hanya menjadi ukuran kinerja organisasi publik, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan organisasi dalam merespons dengan cepat dan tepat akan menentukan efektivitas serta keberhasilannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut (Irfan, dkk 2023), responsivitas BPBD dalam menangani bencana berpedoman pada prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang meliputi cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproletisi. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator-indikator yang mencerminkan responsivitas BPBD:

- 1) Cepat dan Tepat: Tindakan harus segera dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi, sehingga respons dapat menyesuaikan situasi dengan akurat.
- 2) Prioritas: Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan nyawa manusia, menempatkan keselamatan jiwa sebagai fokus utama.
- 3) Koordinasi dan Keterpaduan: Respons bencana dilandasi oleh kerjasama yang solid antarinstansi, dengan keterlibatan berbagai sektor secara terpadu guna mendukung upaya penanganan secara sinergis.

- 4) Berdaya Guna dan Berhasil Guna: Setiap upaya penanggulangan harus dijalankan dengan efisiensi, tanpa menghambur-hamburkan waktu, tenaga, maupun biaya, serta menghasilkan manfaat maksimal dalam mengatasi kesulitan masyarakat.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penanganan bencana dilakukan secara terbuka, sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
- 6) Kemitraan: Melibatkan berbagai pihak dan instansi secara strategis untuk membangun sinergi dalam menghadapi bencana.
- 7) Pemberdayaan: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani bencana.
- 8) Nondiskriminasi: Tidak ada perlakuan berbeda terhadap individu berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau pandangan politik dalam setiap upaya penanggulangan.
- 9) Nonproletisi: Pada situasi darurat, dilarang menyebarkan agama atau keyakinan melalui bantuan atau layanan darurat, untuk menjaga netralitas bantuan yang diberikan.

Responsivitas BPBD menjadi faktor kunci dalam memastikan penanganan bencana yang efektif dan tepat sasaran. Berpedoman pada prinsip-prinsip penanggulangan bencana, BPBD dituntut untuk merespons secara cepat, menetapkan prioritas, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, yang mencerminkan tingkat kesiapan dan profesionalisme dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat turut memperkuat kapasitas BPBD dalam memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat terdampak. Dengan respons yang sigap dan terstruktur, BPBD dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam mengurangi risiko serta dampak bencana.

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Responsivitas

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Responsivitas BPBD Kota Bandar Lampung Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dalam

mendukung kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan dalam menghadapi situasi bencana. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek internal organisasi maupun eksternal lingkungan sosial masyarakat.

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) SDM menjadi salah satu komponen terpenting dalam menentukan responsivitas organisasi. BPBD Bandar Lampung memerlukan tenaga yang kompeten, terlatih, dan siap siaga menghadapi berbagai jenis bencana. Kurangnya pelatihan teknis dan jumlah personel yang terbatas dapat memperlambat proses tanggap darurat serta menghambat efektivitas pelayanan.
- 2) Struktur Organisasi dan Koordinasi Antar instansi Struktur organisasi yang jelas, fleksibel, dan mendukung pengambilan keputusan cepat akan mendorong responsivitas. Selain itu, efektivitas koordinasi lintas instansi, seperti dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan relawan, menjadi kunci dalam mempercepat penanganan bencana. Minimnya koordinasi atau egosektoral antar instansi dapat menjadi hambatan signifikan dalam proses respons.
- 3) Sarana, Prasarana, dan Anggaran Ketersediaan infrastruktur seperti kendaraan operasional, peralatan logistik, dan sistem komunikasi sangat memengaruhi responsivitas. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai dan mudah dicairkan saat kondisi darurat menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap bencana.
- 4) Teknologi dan Sistem Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem peringatan dini, sistem pemantauan logistik berbasis web, dan penyebaran informasi melalui media sosial, menjadi faktor yang mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam merespons bencana. Teknologi ini juga dapat membantu dalam mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran dan transparan.
- 5) Kepemimpinan Kepala Pelaksana
Kepemimpinan memainkan peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan respons organisasi. Kepala Pelaksana BPBD yang memiliki kepemimpinan yang tanggap, komunikatif, dan tegas akan mampu

mengoordinasikan sumber daya dengan baik dan mengambil keputusan secara cepat dalam situasi krisis.

- 6) Partisipasi Masyarakat dan Modal Sosial Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung respons bencana, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai mitra aktif. Tingkat kesadaran, edukasi kesiapsiagaan, serta adanya relawan lokal mempercepat proses respons dan mempermudah koordinasi lapangan. Modal sosial seperti gotong royong dan solidaritas warga menjadi aset penting dalam memperkuat responsivitas organisasi.
- 7) Kesiapsiagaan dan Perencanaan Penyusunan rencana kontinjensi, pelaksanaan simulasi, dan ketersediaan jalur evakuasi merupakan bentuk kesiapsiagaan yang dapat meningkatkan efektivitas respon saat bencana terjadi. Perencanaan yang matang dan teruji akan meminimalkan kebingungan serta mempercepat pengambilan tindakan.

Dengan demikian, responsivitas BPBD Kota Bandar Lampung tidak hanya ditentukan oleh satu aspek saja, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik internal seperti kualitas SDM dan struktur organisasi, maupun eksternal seperti partisipasi masyarakat dan dukungan teknologi. Peran Kepala Pelaksana BPBD sangat sentral dalam mengelola dan mengarahkan seluruh faktor tersebut agar mampu menghasilkan respons yang cepat, tepat, dan efektif dalam menghadapi setiap bencana.

2.3 Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Bandar Lampung

2.3.1 Tantangan Dan Kendala Penanggulangan Bencana Di Kota Bandar Lampung

Tantangan dan Kendala BPBD Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung memiliki peran krusial dalam menangani dan mengelola penanggulangan bencana di kota ini. Namun, mengingat Kota Bandar Lampung yang rawan bencana, BPBD menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah beberapa tantangan dan kendala utama yang dihadapi oleh BPBD Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana.

1) Kerentanan Wilayah terhadap Bencana Alam

- Banjir: Bandar Lampung sering mengalami banjir terutama di musim hujan. Beberapa wilayah, seperti Kecamatan Telukbetung, Tanjung Karang, dan Rajabasa, menjadi langganan banjir karena buruknya sistem drainase dan penurunan permukaan tanah. BPBD harus bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dengan memperbaiki infrastruktur dan memberi edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
- Gempa Bumi dan Tsunami: Sebagai daerah yang terletak dekat dengan Selat Sunda dan Gunung Anak Krakatau, BPBD juga harus siap menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Meski BPBD melakukan upaya mitigasi, risiko besar terkait ancaman gempa bumi dan tsunami tetap tinggi.
- Tanah Longsor: Banyak wilayah di Bandar Lampung yang berbukit, seperti di Kecamatan Rajabasa, yang rentan terhadap tanah longsor. BPBD harus memperhatikan daerah-daerah ini dan melakukan upaya mitigasi serta mempersiapkan sistem peringatan dini.

2) Keterbatasan Infrastruktur Penanggulangan Bencana

- Sistem Drainase yang Buruk: Salah satu kendala utama dalam penanggulangan banjir adalah sistem drainase yang belum memadai. BPBD harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur drainase agar dapat mengatasi banjir lebih efektif. Namun, pembenahan drainase memerlukan anggaran yang besar dan waktu yang lama, serta pengawasan yang lebih intensif.
- Fasilitas Evakuasi yang Terbatas: Beberapa daerah di Bandar Lampung masih kurang memiliki fasilitas evakuasi yang memadai, terutama untuk bencana besar seperti tsunami atau gempa bumi. BPBD seringkali terhambat dalam menyediakan lokasi evakuasi yang aman dan akses mudah bagi warga, terutama di daerah yang rawan bencana.
- Aksesibilitas ke Wilayah Tertentu: Wilayah-wilayah yang terletak di dataran tinggi atau daerah pegunungan memiliki akses terbatas, yang menghambat distribusi bantuan dan evakuasi. BPBD sering kali

menghadapi kendala dalam menjangkau wilayah-wilayah tersebut dengan cepat.

3) Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal

- Koordinasi dengan Instansi Terkait: Meskipun BPBD berperan sebagai lembaga utama dalam penanggulangan bencana, koordinasi antar lembaga seperti Polri, TNI, SAR, dan organisasi kemanusiaan seringkali tidak optimal. Terkadang, setiap lembaga bekerja dengan prosedur yang berbeda atau dalam silo, yang menghambat pengiriman bantuan dan penanganan bencana secara terpadu.
- Koordinasi Antar Kecamatan dan Kelurahan: BPBD juga dihadapkan dengan tantangan koordinasi antara tingkat kecamatan dan kelurahan. Beberapa daerah, terutama di area yang lebih terpencil, sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai dalam hal kesiapsiagaan bencana atau pelaksanaan rencana evakuasi.

4) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

- Keterbatasan Tenaga Terlatih: BPBD Kota Bandar Lampung sering kali kekurangan tenaga terlatih untuk menangani bencana besar. Meskipun sudah ada petugas yang dilatih, jumlahnya masih terbatas, sehingga BPBD harus mengandalkan bantuan dari TNI, Polri, dan relawan. Hal ini menjadi kendala ketika terjadi bencana besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
- Kekurangan Pelatihan Rutin: Selain itu, meskipun sudah ada beberapa pelatihan untuk personel BPBD, pelatihan rutin yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait masih belum optimal. Simulasi bencana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi seringkali tidak dilakukan secara berkala.

5) Anggaran dan Pembiayaan yang Terbatas

- Keterbatasan Anggaran: Salah satu kendala utama dalam penanggulangan bencana adalah keterbatasan anggaran. BPBD sering kali harus bekerja dengan anggaran yang terbatas untuk mengadakan pelatihan, pembelian peralatan, serta membangun infrastruktur mitigasi

bencana yang lebih baik. Pengalokasian anggaran yang kurang memadai menghambat efektivitas operasional BPBD.

- **Dana Darurat yang Tidak Cukup:** Ketika terjadi bencana besar, BPBD seringkali harus mengandalkan dana darurat yang mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bantuan logistik, evakuasi, dan rehabilitasi. Meskipun ada dana dari pemerintah pusat dan bantuan internasional, pengelolaan dana darurat sering kali memerlukan proses administratif yang panjang.

6) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat yang Masih Kurang

- **Kurangnya Pemahaman tentang Mitigasi Bencana:** Sebagian besar masyarakat Bandar Lampung masih kurang memahami pentingnya mitigasi bencana dan cara-cara yang tepat untuk menghadapi bencana. Masyarakat seringkali tidak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana, baik itu gempa bumi, tsunami, atau banjir. BPBD memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi pengaruh dari kegiatan tersebut sering kali terbatas karena minimnya sumber daya dan anggaran.
- **Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana:** Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana dan latihan evakuasi sering kali masih rendah. Hal ini menghambat upaya BPBD untuk menciptakan budaya kesiapsiagaan bencana yang solid di tingkat komunitas.

7) Pemanfaatan Teknologi yang Terbatas

- **Sistem Peringatan Dini:** Meskipun sudah ada beberapa sistem peringatan dini untuk bencana seperti gempa bumi dan tsunami, pemanfaatannya di tingkat lokal masih terbatas. BPBD Kota Bandar Lampung seringkali terhambat dalam mengoptimalkan teknologi informasi untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat, terutama dalam hal peringatan dini.
- **Sistem Informasi Bencana yang Terintegrasi:** BPBD juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi data terkait bencana. Data mengenai kerentanannya terhadap bencana, lokasi titik evakuasi, serta informasi

logistik sering kali tidak terintegrasi dengan baik, yang menghambat proses koordinasi dan respons.

8) Perubahan Iklim dan Dampaknya

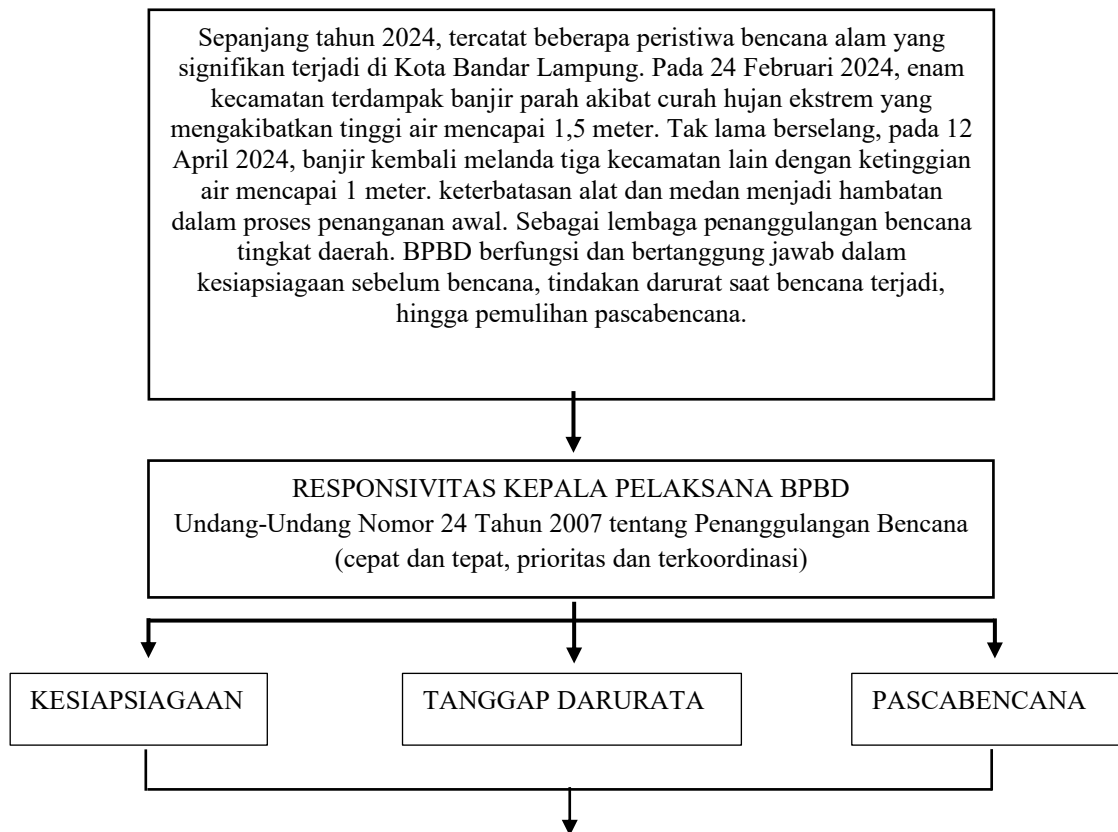
- Variabilitas Cuaca yang Ekstrem: Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem, seperti hujan deras dalam waktu singkat dan gelombang panas, membuat prediksi dan perencanaan penanggulangan bencana lebih sulit. BPBD harus lebih adaptif dalam merespons cuaca yang semakin tidak menentu, serta memastikan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.

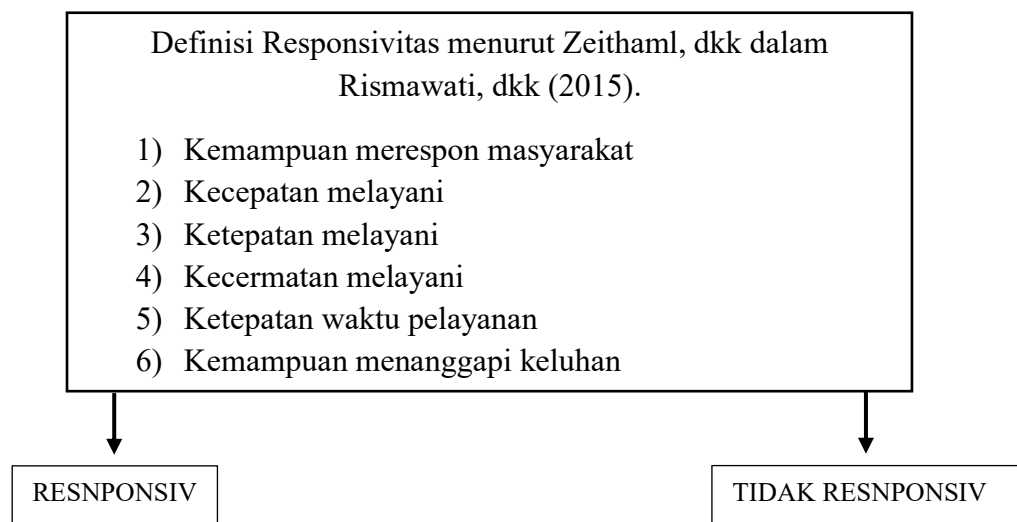
BPBD Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam penanggulangan bencana. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas BPBD adalah kerentanan wilayah terhadap bencana, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta anggaran yang terbatas. Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga, kurangnya pelatihan rutin, dan rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan utama dalam memperkuat penanggulangan bencana di kota ini. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, BPBD perlu terus memperkuat koordinasi antar lembaga, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat respons terhadap bencana. Selain itu, pengalokasian anggaran yang lebih besar dan pelatihan yang rutin akan memperkuat kapasitas BPBD dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk menjelaskan responsivitas kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dengan tingkat responsivitas BPBD Kota Bandar Lampung dalam menangani bencana. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kepala pelaksana BPBD berperan dalam meningkatkan responsivitas BPBD pada tiga tahap utama penanggulangan bencana, yaitu kesiapsiagaan sebelum bencana, tanggap darurat saat bencana terjadi, dan pemulihan pascabencana.

Peran kepala pelaksana BPBD yang efektif berkontribusi langsung terhadap peningkatan responsivitas BPBD, baik dalam pengambilan keputusan, koordinasi dengan berbagai pihak, maupun optimalisasi sumber daya yang tersedia. Dalam penelitian ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peran Kepala pelaksana BPBD serta bagaimana faktor tersebut berdampak pada efektivitas responsivitas BPBD dalam menangani bencana di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan dalam BPBD dan tingkat responsivitas dalam penanggulangan bencana. Kerangka pikir dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 1 Kerangka Pikir
Sumber : Ilustrasi Penulis

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian terhadap Peran Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dalam meningkatkan responsivitas BPBD Kota Bandar Lampung menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendapat Moleong (2007) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. Melalui penelitian kualitatif penulis dapat

mengeksplorasi secara mendalam terkait peran kepala BPBD dalam meningkatkan responsivitas BPBD terhadap bencana alam kota Bandar Lampung.

Berbeda dengan pendapat Sugiono (2005) yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian. Menurut Saryono, metode penelitian kualitatif selain digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menggambarkan objek yang diteliti. Ternyata juga dapat digunakan untuk menjelaskan atau menuliskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang kemudian dijelaskan dan diukur menggunakan pendekatan kuantitatif. Moleong senada dengan Bogdan dan Taylor (1975), dimana mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail. Metode penelitian kualitatif menurut Danim (2002) mengartikan bahwa kualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa realita memiliki dimensi jamak dan interaktif. Dapat pula diartikan sebagai upaya pertukaran pengalaman sosial yang dapat didefinisikan lewat hasil penelitian. Jadi, penelitian kualitatif beranggapan bahwa kebenaran itu bersifat dinamis dan dapat ditemukan melalui kajian terhadap orang melalui interaksi ataupun lewat situasi sosial.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ialah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan data pendukung, yaitu seperti data yang diperoleh dengan teknik wawancara. Analisis penelitian yang berdasarkan fakta yang ada dilapangan nantinya menjadi teori pembahasan, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna yang mendalam yaitu data yang sebenarnya terkait pada peran kepala BPBD dalam meningkatkan responsivitas BPBD Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, dengan fokus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan Kepala BPBD dalam meningkatkan responsivitas terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut.

3.3 Fokus Penelitian

Spradley dalam (Sugiyono, 2019) mengemukakan pengertian fokus penelitian bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Peneliti menetapkan fokus penelitian ini sesuai dengan penelitian yang berdasarkan nilai temuan serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan informan. Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu Penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian ini melihat bagaimana Peran Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dalam meningkatkan responsivitas terhadap bencana alam di Kota Bandar Lampung, mengkaji bagaimana Kepala pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung memimpin dan mengelola seluruh aspek penanggulangan bencana, mulai dari tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Penekanan akan diberikan pada peran yang dilakukan dalam setiap tahap penanggulangan bencana.

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019), sumber data penelitian adalah subjek yang memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Ridwan (2008), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer Data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara. Data Primer diperoleh langsung dengan observasi dan wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (sebagai informan), Bidang Kedaruratan dan Logistik (sebagai informan), dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (sebagai informan).
2. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini akan dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen atau catatan yang berhubungan dengan objek penelitian seperti monografi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta peraturan daerah. Buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti buku inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan peneliti adalah informan terpercaya yang mengetahui dan paham mengenai peran Kepala Badan Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan responsivitas BPBD terhadap bencana di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Wakhidi, S.H.,M.S.i	Kepala Pelaksana BPBD
	Muhammad Alfa Riyan	Anggota Satgas Bencana BPBD
		Masyarakat

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengambilan data yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

a) Observasi

Observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2017), observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung mengenai objek penelitian tanpa melalui perantara. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Prof. Heru dalam Sugiyono (2017) mengenai observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam konteks studi kasus atau pembelajaran dengan cara yang sengaja, terarah, dan urut, serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Pencatatan yang dilakukan selama kegiatan pengamatan disebut sebagai hasil observasi, yang harus dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat. Observasi bukan sekadar melihat, tetapi melibatkan proses sistematis untuk mengumpulkan data yang valid dan informasi yang benar dari fenomena yang diteliti. Observasi bertujuan untuk memahami kondisi dan membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Anas Sudijono 2010). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba mendapatkan informasi dari responden secara lisan, dan untuk berkomunikasi tatap muka (Koentjaraningrat). Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya jawab dengan seseorang pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Wawancara diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara Peneliti

dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal (Gulo, 2002). Wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya (Sutrisno Hadi 1989).

Dari berbagai definisi di atas, wawancara dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan dialog antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai format (terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur) tergantung pada kebutuhan penelitian dan konteks situasi. Wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan informan sesuai dengan kompetensi dan tugasnya pada BPBD Kota Bandar Lampung serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dokumen yang berisi informasi yang relevan mengenai pertanyaan penelitian. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data tentang latar belakang dan konteks sejarah penelitian. Dokumentasi dapat berupa laporan, foto, gambar, buku harian, surat, dan sebagainya (Julmi 2020). Alasan Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam Penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan Peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Saat data telah diperoleh, maka selanjutnya yaitu teknik pengelolaan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk dalam Singarimbun (2008) terdiri dari beberapa langkah penting yang dirancang untuk memastikan data yang telah dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis dengan efektif, diantaranya ialah:

a) Editing Data

Menurut Efendi dkk. dalam Singarimbun (2008) Editing adalah proses pemeriksaan dan penilaian kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaian dan relevansi data yang akan diproses lebih lanjut. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk Penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu Peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik. Editing bertujuan untuk menghilangkan kesalahan dalam pencatatan, memastikan bahwa semua jawaban telah diisi dengan benar, dan memperbaiki keterbacaan tulisan (Singarimbun, 2008).

b) Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses memaknai dan memberikan arti pada kumpulan data yang telah diolah. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel yang ada dalam data tersebut, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dan relevan dengan tujuan penelitian. Interpretasi penelitian juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil Penelitian akan dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan.

3.8 Teknik Penyajian Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono (2018). Sedangkan menurut Miles & Huberman (1994) analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses yang dinamis dan terus-menerus sepanjang pengumpulan data hingga penulisan laporan. Mereka menyatakan bahwa analisis data kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018), reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya serta pencarian informasi jika diperlukan. Sedangkan menurut Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data sebagai suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Proses ini juga melibatkan pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b) Penyajian Data (Data Display)

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini merupakan suatu langkah yang penting dalam proses penelitian yang berfungsi untuk menyampaikan hasil analisis kepada pembaca dengan cara yang jelas dan terstruktur, termasuk penggunaan tabel, grafik, dan diagram. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menyusun informasi yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga memudahkan analisis dan interpretasi. Penyajian ini bisa dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif atau tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ialah penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti sangat berharap dan berusaha kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yang berkaitan dengan Bagaimana kepemimpinan kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dalam meningkatkan responsivitas terhadap bencana alam di Kota Bandar Lampung dengan hasil Penelitian. Interpretasi data menjadi langkah yang krusial dalam proses penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memberikan makna pada informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian hasil dengan cara yang dapat dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

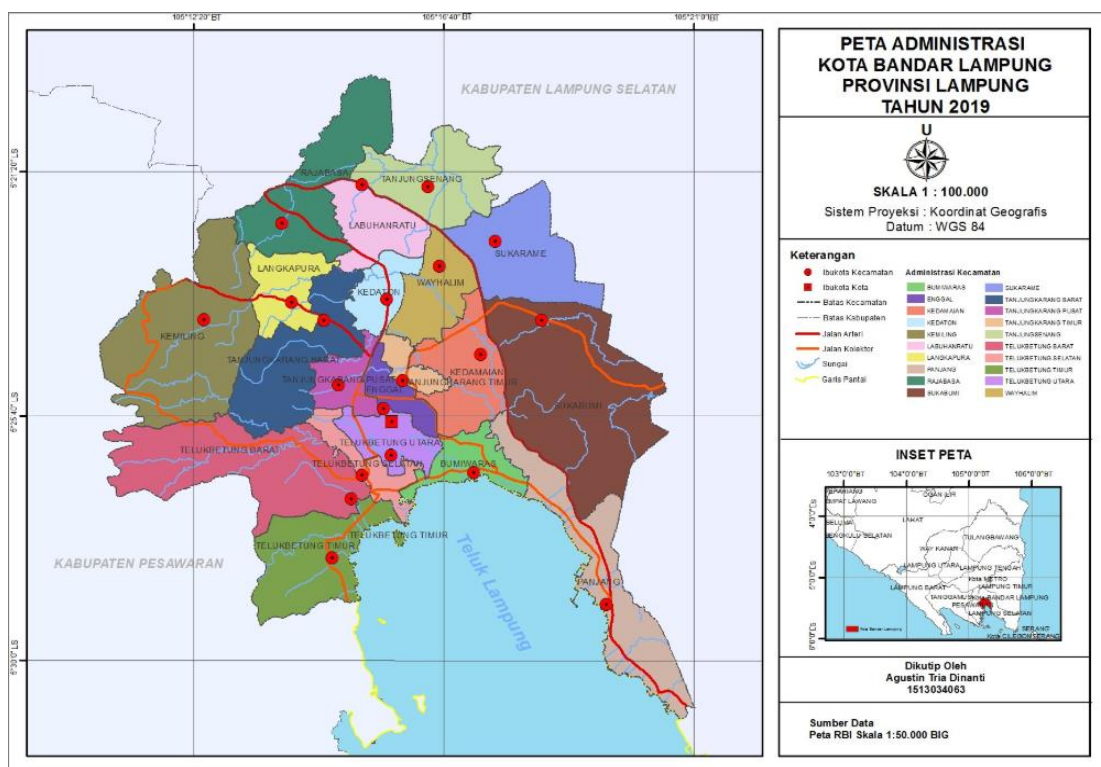
3.9 Teknik Validasi Data

Moleong (2010) menyatakan bahwa validasi data dalam penelitian kualitatif mencakup kepercayaan terhadap hasil penelitian yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data dan analisis yang sistematis. Penelitian kualitatif melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yaitu:

- a) Uji Kredibilitas (Credibility) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).
- b) Uji keteralihan (Transferability) Dalam membuat laporannya, peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca akan menjadi lebih jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2019).

IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung



Gambar 2 Peta Administratif Kota Bandar Lampung 2015.
(Sumber: Peta Tematik Indonesia 2015).

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung dan merupakan kota terbesar di provinsi tersebut. Secara geografis, kota ini terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya pada koordinat $5^{\circ}20'$ hingga $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ hingga $105^{\circ}37'$ Bujur Timur, menjadikannya sebagai gerbang utama menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Kota Bandar Lampung memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, perekonomian dan pariwisata bagi

masyarakat Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sekitar 197,22 km² yang dibagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administrasi Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran; dan
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan tinjauan topografi, Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian antara 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut, yang mencakup berbagai jenis wilayah yaitu sebagai berikut:

- 1) Daerah pantai, yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang;
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara;
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau;
- 4) Perbukitan Batu Serampok di bagian Timur Selatan; dan
- 5) Teluk Lampung dan pulau - pulau kecil bagian selatan.

Terdapat sejumlah sungai yang mengalir di wilayah Kota Bandar Lampung, seperti Way Halim, Way Balau, Way Awi, dan Way Simpung yang terletak di wilayah Tanjung Karang. Sementara itu, sungai Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, dan Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung. Sungai-sungai ini memiliki daerah hulu yang terletak di bagian barat dan hilir yang mengalir di bagian selatan menuju kawasan pantai. Secara umum, wilayah kota terbagi dalam tiga jenis kontur tanah yaitu sekitar 60 persen wilayahnya terdiri dari daerah datar hingga landai, 35 persen lainnya landai hingga miring dan hanya sekitar 4 persen yang berupa daerah sangat miring hingga curam.

Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung juga merupakan kawasan perbukitan. Beberapa bukit dan gunung yang terkenal di kota ini antara lain

Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, dan banyak lagi. Bukit-bukit lain yang tersebar di berbagai lokasi kota juga turut memperkaya topografi Kota Bandar Lampung, termasuk Bukit Serampok, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, dan gugusan Bukit Hatta. Semua unsur alam ini memberikan keberagaman dan keindahan alam yang memengaruhi kehidupan serta tata ruang kota ini.

Tabel 2 Kondisi Demografi Kota bandar Lampung 2024

<i>Kecamatan</i>	Jumlah Penduduk	Luas Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Km ²)
Teluk Betung Barat	38.527	18,26	2.110
Teluk Betung Timur	49.926	10,39	4.805
Teluk Betung Selatan	39.359	3,49	11.278
Bumi Waras	58.169	4,52	12.869
Panjang	74.858	13,64	5.488
Tanjung Karang Timur	38.542	2,07	18.619
Kedamaian	53.457	8,34	6.410
Teluk Betung Utara	50.587	4,38	11.550
Tanjung Karang Pusat	50.326	3,50	14.379
Enggal	24.752	2,78	9.263
Tanjung Karang Barat	63.194	11,54	5.476
Kemiling	86.300	21,33	4.046
Langkapura	43.372	5,30	8.183
Kedaton	52.388	3,77	13.896
Rajabasa	55.958	12,93	4.328
Tanjung Senang	62.402	9,24	6.753
Labuhan Ratu	48.208	6,10	7.903
Sukarame	67.138	10,92	6.148
Sukabumi	73.178	25,04	2.922
Way Halim	68.468	6,25	10.955
Total	1.100.109	183,77	5.986

Sumber: Badan Pusat Statistika, Bandar Lampung Dalam Angka 2024

Jumlah penduduk yang terus berkembang di Kota Bandar Lampung berpengaruh pada berbagai masalah sosial dan ekonomi, salah satunya kemiskinan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan industri, kemiskinan di wilayah perkotaan semakin menjadi masalah besar. Semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kota juga meningkatkan jumlah orang yang hidup dalam kondisi miskin. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang fokus pada pengurangan kemiskinan. Kebijakan ini harus bisa memanfaatkan

sumber daya alam () dengan bijak dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) secara maksimal. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan akses yang lebih baik pada pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Selain itu, dengan memperkuat ekonomi lokal dan membangun infrastruktur yang merata, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung dapat meningkat, dan kemiskinan bisa berkurang.

4.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan. BPBD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kota Bandar Lampung, baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca-bencana.

Pembentukan BPBD Kota Bandar Lampung mengacu pada amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah, keberadaan BPBD diatur melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPBD Kota Bandar Lampung.

Secara fungsional, BPBD Kota Bandar Lampung bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, memberikan edukasi serta pelatihan kepada masyarakat, menyelenggarakan sistem peringatan dini, serta melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD Kota Bandar Lampung menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam kesiapsiagaan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Desa Tangguh Bencana, yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu,

BPBD juga secara rutin melakukan simulasi evakuasi, pelatihan relawan, serta pemasangan rambu jalur evakuasi, terutama di wilayah pesisir yang rawan terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami.

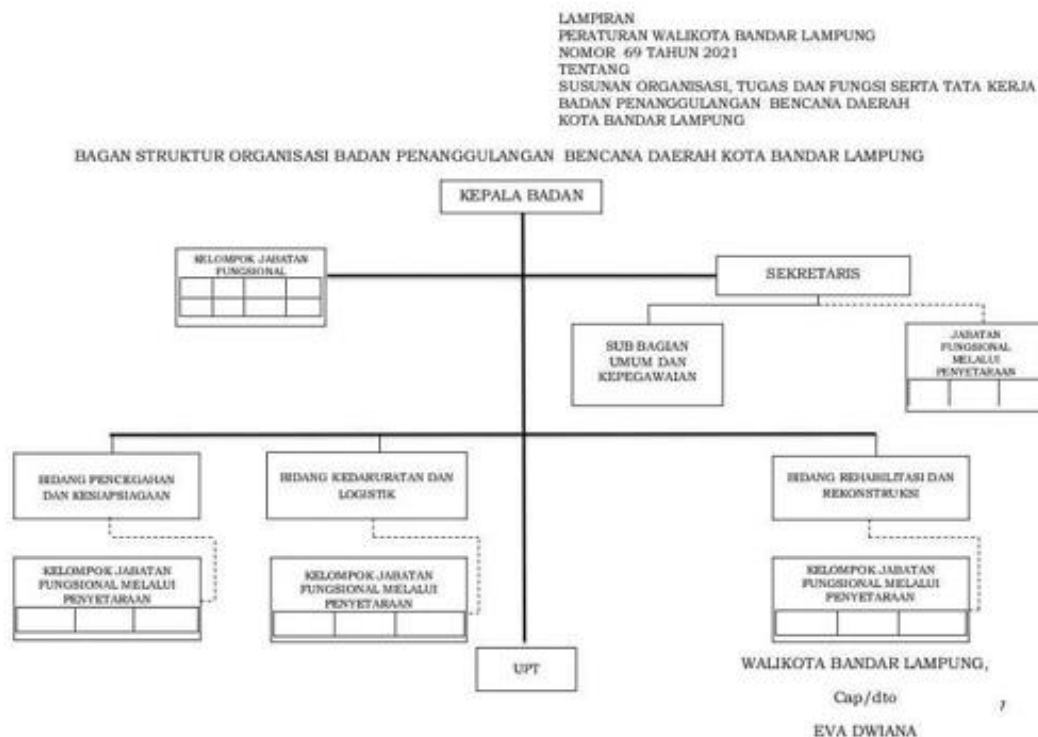
Dengan struktur kelembagaan yang solid, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat, BPBD Kota Bandar Lampung menjadi garda terdepan dalam membangun ketangguhan wilayah terhadap berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi.

4.2.1 Struktur Organisasi BPBD

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 mengenai Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri tentang BPBD), struktur organisasi BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana (Puspita & Sembiring, 2024). Pada implementasi di daerah, struktur organisasi BPBD dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing masing daerah. Meskipun secara umum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan struktur organisasi BPBD agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Faktor seperti luas wilayah, tingkat kerawanan bencana, serta kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dapat memengaruhi perbedaan dalam susunan organisasi BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 69 Tahun 2021, susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari: a) Kepala Badan; b) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana meliputi lembaga/instansi pemerintah daerah dan masyarakat profesional/tenaga ahli; c) Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan; d) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan; e) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan; f) Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi dengan Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan; g) Unit Pelaksana Teknis; h) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa struktur organisasi penanggulangan bencana mencakup Kepala Badan sebagai pimpinan, Unsur Pengarah yang melibatkan pemerintah daerah dan tenaga ahli, Sekretariat dengan subbagian dan jabatan fungsional, tiga bidang utama (Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang terintegrasi dengan jabatan fungsional, Unit Pelaksana Teknis, serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pendukung operasional. Dengan struktur organisasi ini, BPBD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menanggulangi bencana.

4.2.2 Peran Kepala Pelaksana BPBD

Peran merupakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan atau tindakan dalam menjalankan suatu fungsi (Sari, 2023). Peran merupakan unsur yang aktif dari suatu

posisi atau status. Pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai peran yang diemban menandakan implementasi nyata dari peran tersebut (Ningsih, 2022). Secara terminologis, peran merujuk pada serangkaian perilaku yang diharapkan masyarakat dari seseorang sesuai dengan posisi atau status sosial yang dimilikinya. Dalam konteks bahasa Inggris, konsep ini disebut *role*, yang didefinisikan sebagai tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang dalam suatu aktivitas atau pekerjaan (Sekartaji, Sadat & Nastia, 2022). Dengan demikian, peran dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau tindakan dalam menjalankan fungsi tertentu yang bersifat dinamis sesuai dengan kedudukan seseorang di masyarakat, di mana peran mencakup hak, kewajiban, serta seperangkat perilaku yang diharapkan dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran Kepala BPBD berarti serangkaian aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang dijalankan dalam fungsi kepemimpinan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 69 Tahun 2021, Kepala Badan Penanggulangan Bencana menjalankan peran strategis yang meliputi penyusunan konsep kebijakan terkait mitigasi bencana, pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, serta penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program penanggulangan bencana. Selain itu, tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota juga menjadi tanggung jawabnya untuk dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Setiap fungsi yang diemban oleh Kepala BPBD memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawab yang dijalankan, berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut:

- 1) Merumuskan konsep kebijakan dalam penanggulangan bencana

Fungsi ini menekankan peran strategis Kepala BPBD dalam menyusun kerangka dan pedoman dasar penanggulangan bencana. Proses perumusan tersebut melibatkan analisis mendalam mengenai potensi risiko, karakteristik wilayah, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Kebijakan yang dirumuskan akan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan,

tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak bencana secara efektif.

- 2) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana

Fungsi pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan tepat dan sesuai rencana. Kepala BPBD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memastikan bahwa setiap hambatan dapat diatasi secara cepat agar strategi yang diterapkan tetap efektif dan tepat sasaran.

- 3) Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk memastikan efektivitas dan efisiensi Evaluasi

Merupakan proses analitis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam fungsi ini, Kepala BPBD harus menilai capaian dan dampak dari setiap program, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi perbaikan bila diperlukan. Hal ini penting agar strategi penanggulangan bencana selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga mencapai hasil yang optimal.

- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Fungsi ini memberikan fleksibilitas kepada Kepala BPBD untuk mengakomodasi tugas-tugas tambahan yang mungkin timbul seiring dengan dinamika penanggulangan bencana. Tugas tambahan ini harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang ada, sehingga Kepala BPBD dapat merespons kebutuhan mendesak atau situasi baru yang muncul, guna menjaga kelancaran dan efektivitas seluruh rangkaian penanggulangan bencana di wilayah Bandar Lampung.

Dengan demikian, peran Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung sangatlah strategis dan menentukan efektivitas setiap tahapan kebijakan yang diterapkan. Kepala BPBD tidak hanya berperan dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab dalam pemantauan

dan evaluasi agar setiap program yang dijalankan berjalan optimal serta sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, fleksibilitas dalam menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota menegaskan bahwa Kepala BPBD memiliki peran sentral dalam koordinasi lintas sektor demi terciptanya responsivitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap peran dan fungsi Kepala BPBD menjadi aspek penting dalam meningkatkan responsivitas sistem penanggulangan bencana, sehingga dapat meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

4.3 Konsep Dan Teori Pelayanan Publik

4.3.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan proses memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan haknya. Pelayanan merupakan kegiatan untuk melayani aktivitas seseorang, pada suatu kelompok organisasi untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan merupakan bentuk melayani suatu jasa yang diperlukan masyarakat dalam berbagai bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara, dimana pelayanan publik ini merupakan kunci utama keberhasilan dalam berbagai usaha.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam (Pasolong, 2013) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh para pemerintah terhadap masyarakat yang setiap kegiatannya dapat menguntungkan suatu kumpulan dan menawarkan suatu kepuasan kepada masyarakat meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Boediono dalam (Hutasoit, 2011) mengatakan pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah atau lembaga, yang tidak termasuk dalam badan usaha swasta, yang tidak cenderung melihat pada keuntungan. Bergesernya paradigma pelayanan yang lebih berorientasi kepada

pelanggan atau masyarakat hendaknya dijadikan nilai yang melekat dalam jiwa aparatur pemerintah dan tercermin melalui sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut (Batinggi & Ahmad, 2014) “Pelayanan merupakan kunci dari keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan- kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran dan langganan. Demikian pula di bidang pemerintahan, peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, belum dapat memenuhi harapan semua pihak sehingga diperlukan sistem manajemen untuk penyelenggaraan pelayanan umum”.

Menurut (Maryam, 2016) Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sementara itu, menurut (Hardiansyah, 2018) menjelaskan pelayanan publik merupakan “Bentuk kegiatan pelayanan, berupa barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab di berbagai instansi seperti, pemerintah pusat, daerah, lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2 Konsep Pelayanan Publik

Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku yang artinya umum, orang banyak, atau ramai. Pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan atau keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009) Bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa:

”Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara serta penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. pelayanan publik dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan, baik berupa barang maupun jasa yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pelayanan publik umumnya dapat diatur dalam sebuah pedoman umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dari hasil penelitian, dan dari rujukan pendapat para ahli untuk menciptakan sebuah standar pelayanan yang berkualitas.

Masyarakat selalu menginginkan pelayanan publik yang memiliki standar kualitas yang baik dari para penyedia pelayanan, namun kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Masih banyak bentuk pelayanan yang berbelit-belit, lambat, mengeluarkan banyak biaya, dan menguras banyak waktu dan tenaga. Pelayanan publik merupakan ujung tombak interaksi antara pemerintah dan masyarakat, kinerja pemerintah juga dapat dinilai dari sejauh mana kualitas pelayanan publik.

Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Karena kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis, karena hal tersebut sangat menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan apa tujuan pendiriannya.

4.3.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Para pakar administrasi publik menjelaskan bahwa ada banyak prinsip yang perlu dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih baik. Namun demikian, sebelum kita mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, sebagai seorang ASN Saudara perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamen pelayanan publik. Selain hal-hal yang mendasar yang perlu dijadikan pegangan dalam memberikan pelayanan publik, Saudara sebagai seorang ASN perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat

pada tubuh birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

1) Partisipatif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.

2) Transparan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3) Responsif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

4) Tidak diskriminatif

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya.

5) Mudah dan Murah

Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah, persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti

biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi.

6) Efektif dan efisien

Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuantujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.

7) Aksesibel

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dll.) dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Modul Pelayanan Publik.

8) Akuntabel.

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan (pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal) akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability.

9) Berkeadilan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga

negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.

4.3.4 Asas-Asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan yang bersifat terbuka, lincer, sederhana, tepat, lengkap, serta terjangkau. Menurut (Saggaf & Saggaf, 2018), Asas-asas pelayanan publik antara lain:

- a) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan harus jelas serta diketahui oleh masing-masing pihak.
- b) Pengaturan setiap bentuk pelayanan publik harus sesuai dengan kebutuhan serta kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar serta berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien.
- c) Mutu proses penyelenggara dan hasil pelayanan publik harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan.

4.3.5 Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut (Ramadhana et al., 2020), mengatakan bahwa unsur penting dalam pelayanan publik ada empat, sebagai berikut :

- a) Penyedia layanan, adalah para penyelenggara layanan yang bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk penyediaan barang ataupun jasa.
- b) Penerima layanan, adalah pihak yang membutuhkan adanya layanan dari para penyelenggra layanan.
- c) Jenis layanan, merupakan bentuk kegiatan layanan yang dapat diberikan oleh penyelenggara layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. Kepuasan pelanggan, artinya bagaimana memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan standar operasional prosedur yang mengacu pada bentuk kualitas pelayanan yang baik. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan

yang didapatkan para pelanggan, sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang mereka dapatkan.

4.3.6 Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai masyarakat. Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi harapan-harapan masyarakat dan memuaskan kebutuhan mereka. Namun, demikian meskipun definisi ini berorientasi pada pengguna layanan, tidak berarti bahwa dalam menentukan kualitas pelayanan harus menuruti semua keinginan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pengguna layanan atas pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Menurut Hardiansyah (2018) Pelayanan yang berkualitas dapat dinilai dari dimensi-dimensi Pelayanan sebagai berikut:

1) Dimensi Tangible (Bukti Fisik)

Dimensi ini merupakan kemampuan suatu penyedia layanan dalam menunjukkan eksistensinya pada masyarakat. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa yang meliputi fasilitas fisik tempat pelayanan tersebut, teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan) serta penampilan pegawai dalam melayani pengguna layanan. Secara singkat dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personil. Pada penelitian ini, dimensi Tangible ditentukan oleh indikator-indikator yaitu penampilan aparatur saat melaksanakan tugas pelayanan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam melakukan pelayanan, kemudahan akses masyarakat dalam permohonan pelayanan, dan penggunaan alat bantu dalam pelayanan. Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sudah menerapkan dimensi Tangible beserta indikatornya.

2) Dimensi Reliability (Kehandalan)

Dimensi ini merupakan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan sangat membantu masyarakat dalam menerima pelayanan dengan cepat dan mudah. Kehandalan dapat dilihat dari kecermatan dalam melayani, kemampuan dan keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Kehandalan merupakan kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

3) Dimensi Responsiviness (Ketanggapan)

Dimensi ini merupakan kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan, dengan penyampaian informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Secara singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu pengguna layanan dengan baik dan cepat. Selanjutnya dimensi yang ketiga adalah Dimensi Assurance (Ketanggapan). Dimensi ini merupakan jaminan dan kepastian Selvi Rianti, Kualitas Pelayanan Publik 418 yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya pengguna layanan kepada penyedia layanan. Terdiri dari komponen komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keramah tamahan pengawai dan kemampuan pegawai untuk dapat dipercaya dan diyakini.

4) Dimensi Emphaty (Empati)

Dimensi ini memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pengguna layanan dengan berupaya memahami keinginan pengguna layanan dimana penyedia layanan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pengguna layanan, memahami kebutuhan pengguna layanan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi masyarakat. Secara singkat dapat diartikan sebagai usaha untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan pengguna layanan

secara individual. Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sudah menerapkan dimensi Emphaty berserta indikatornya.

4.3.7 Responsivitas Pelayanan Publik

Responsivitas secara singkat menunjuk kepada keselarasan program dan kegiatan pelayanan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dalam pelayanan publik. Menurut (Silalahi & Syafri, 2015) menunjuk kepada responsivitas dari pejabat publik kepada masyarakat dalam berbagai tindakan serta kegiatan dalam pelayanan publik.

Responsivitas yaitu tanggung jawab dari sisi penerima pelayanan atau masyarakat. Sejauh mana masyarakat dapat melihat penyelenggara pelayanan bersikap tanggap terhadap permasalahan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Responsivitas pelayanan publik sangat diperlukan, karena ini menjadi bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan pelayanan yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat dalam suatu negara. Tentunya responsivitas adalah cara yang efisien dalam mengatur urusan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.4 Tugas Kepala Pelaksana BPBD

Kepala pelaksan BPBD mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala pelaksana BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana,
2. Perumusan kebijakan Teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Penyelenggaraan fasilitas, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPBD.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, kepala pelaksana BPBD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum dan menyusun teknis pengelolaan penanggulangan bencana skala Kabupaten;
2. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan RENSTRA dan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
3. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan PRJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
4. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ, LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan bidang penanggulangan bencana daerah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
5. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja BPBD sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
6. Menyampaikan laporan keuangan BPBD kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
7. Menyelenggarakan perencanaan, pemahaman, pengenalan, pengkajian penanggulangan bencana dan analisis kemungkinan dampak bencana;
8. Menyelenggarakan tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang pendanaan serta kegiatan persiapan penanggulangan bencana;
9. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana;
10. Menyelenggarakan pengorganisasian, pemasangan, pengujian sistem peringatan dini bencana dan uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
11. Menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
12. Menyelenggarakan penyusunan data akurat, informasi dan prosedur tetap tanggap darurat bencana;

13. Menyelenggarakan penyiapan lokasi evakuasi dan penyelamatan masyarakat yang terkena bencana;
14. Menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
15. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta penentuan status keadaan darurat bencana;
16. Menyelenggarakan rehabilitasi, perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum daerah bencana;
17. Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pelayanan kesehatan yang terkena bencana;
18. Menyelenggarakan pemulihan sosial psikologis, ekonomi dan budaya;
19. Menyelenggarakan pemulihan keamanan dan ketertiban;
20. Menyelenggarakan pemulihan fungsi Pemerintahan dan fungsi Pelayanan Publik;
21. Menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi bencana dan penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
22. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
23. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada BPBD;
24. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan BPBD;
25. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada BPBD;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BPBD.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Responsivitas Kepala Pelaksana BPBD dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan responsivitas organisasi pada tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pascabencana. Kepemimpinan yang dijalankan secara adaptif dan komunikatif turut mendorong efektivitas kinerja lembaga.
2. Pada tahap kesiapsiagaan, BPBD telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pemetaan daerah rawan bencana. Namun demikian, kegiatan tersebut masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat.
3. Pada tahap tanggap darurat, respons BPBD cukup cepat melalui pengaktifan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan pendirian posko darurat. Meskipun demikian, keterlambatan distribusi bantuan serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.
4. Pada tahap pascabencana, Kepala Pelaksana BPBD memimpin upaya rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap. Akan tetapi, keterbatasan anggaran, kurangnya personel, dan belum adanya sistem pemantauan terpadu menyebabkan pemulihan belum sepenuhnya maksimal.
5. Faktor-faktor yang memengaruhi responsivitas BPBD di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem koordinasi antar instansi, sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, saran yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan BPBD perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan serta peningkatan jumlah personel yang terlatih di bidang kebencanaan.
2. Diperlukan penguatan sistem informasi kebencanaan yang berbasis teknologi, termasuk optimalisasi sistem peringatan dini dan pemanfaatan media sosial untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.
3. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, baik secara struktural maupun operasional, antara BPBD dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta organisasi kemasyarakatan dan relawan lokal.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti logistik, alat berat, serta fasilitas evakuasi.
5. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi rutin terkait mitigasi bencana serta pelibatan aktif dalam simulasi tanggap darurat, guna membentuk budaya sadar bencana di tingkat komunitas.
6. Kepala Pelaksana BPBD diharapkan dapat terus mengembangkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif, agar dapat menghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Putra, D. (2020). Akuntabilitas Penggunaan Anggaran dalam Program Pemulihan Pascabencana. *Jurnal Akuntabilitas Bencana*, 3(2), 45-55.
- Aufik, A. S. (2021). Pengelolaan Risiko Bencana Alam di Indonesia: Studi Kasus BPBD Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Risiko*, 10(2), 45-58.
- Badri, M. (2018). Sistem Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial Pasca Bencana. *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(1), 66-80.
- Fadhal, S. (2020). Komunikasi publik di tengah krisis: tinjauan komunikasi pemerintah dalam tanggap darurat pandemi Covid-19.
- Fajar, I., & Usman, B. (2023). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Banjir Di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(1).
- Firmansyah, A., & Jamil, M. (2021). Pengaruh Kecepatan dan Akurasi Asesmen Awal Terhadap Efektivitas Tanggap Darurat Bencana. *Jurnal Pengurangan Risiko Bencana*, 7(1), 20-30.
- Frasetya, V., Corry, A., Trenggono, N., & Putra, P. (2021). Komunikasi Mitigasi Bencana Kota Bandar Lampung. *Komunika*, 4(1), 01-18.
- Hardianto, M. A., & Polyando, P. (2024). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Bencana Tanggap Darurat Angin Kencang Di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Bencana Tanggap Darurat Angin Kencang Di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

- Harmain, R. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Korban Bencana Alam (Kajian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). *Lex Crimen*, 10(11)
- Hasan, F., & Putri, L. (2018). Pengaruh Komunikasi BPBD Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Pascabencana. *Jurnal Komunikasi Bencana dan Krisis*, 4(2), 80-90.
- Hidayat, A. S. (2023). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Angin Kencang Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Hidayat, F., & Mukhtar, S. (2017). Koordinasi Tim SAR dalam Operasi Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Z. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 3(2), 60-70.
- Kabullah, M. I., Koeswara, H., & Rahmadi, D. (2020). Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 114-133. Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung Lampung 2016-2020 Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015.
- Ladira, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Bantaeng: Analysis Of The Implementation Of The Functions Of The Regional Disaster Management Agency (Bpbd) Of Bantaeng Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- M.Pd., P. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana..
- Manik, A. (2019). Analisis Reliabilitas dan Responsivitas dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.

- Marlizar, D., Dista, R., & Marefanda, N. (2023). Strategi Penanganan Bencana Badan Sar Nasional di Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Public Service*, 3(1), 7-11.
- Mulyana, D. (2020). *Kepemimpinan dalam Organisasi Penanggulangan Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Ningsih, A. C. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 21-22.
- Novita, I., & Hariadi, B. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Pada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota. *JAPAn: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2), 131-136. <http://ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/JAPan/article/view/88>
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2020). *Laporan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2020*. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024.
- Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.
- Pratiwi, D., & Susanto, A. (2020). Peran Komunikasi Krisis BPBD dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Saat Bencana. *Jurnal Komunikasi Krisis*, 6(1), 12-22.
- Pratmo, A. Y., Dkk. (2020). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Banjar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab)*.

- Prayoga, H. R. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/12323/>.
- Prihatin, R. B. (2018). Masyarakat sadar bencana: pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 221-239.
- Puspita, N. Y., & Sembiring, F. (2024). Kewenangan Hukum Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta: *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 9(2), 232-256.
- Putri, H. S., Sagita, A., & Ulvia, H. (2024). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menangani Keluhan Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 2(2), 27-39.
- Putri, H. S., Sagita, A., & Ulvia, H. (2024). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menangani Keluhan Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 2(2), <https://journal.aptii.or.id/index.php/Repeater/article/view/45>
- Rahmat, H. K., Sos, S., & Han, M. (2024). Manajemen Keorganisasian Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Penerbit Adab. Purnomo, H. (2007). Peran Pemerintah, Organisasi Kemanusiaan dan Grassroot dalam Manajemen Bencana. *Equilib. J. bisnis dan Akunt. Fak. Ekon. UKRIM Yogyakarta*, 1(1), 2007.
- Rama, F., & Qadriina, H. I. (2024). Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: Konsep dan metode teknis monitoring. *Information, Communications, and Disaster*, 1(1).
- Reza, M., Suparmono, S., Julian, D., & Putriani, R. B. (2024). Edukasi Mitigasi Bencana Banjir Rob di Pesisir Kota Bandar Lampung. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 3(1), 237-243.

- Rianto, A. Ma'ruf, Farid. (2015). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Letusan Gunung Kelud. *Publika*, 3(6).
- Santoso, B., & Dewi, R. (2019). Peran Koordinasi BPBD dalam Efektivitas Pemulihan Pascabencana. *Jurnal Koordinasi Pemulihan Bencana*, 2(1), 15-25.
- Sari, A. R. (2023). Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sekartaji, D. N., Sadat, A., & Nastia, N. (2022). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 6967-6974.
- Setiawan, D., & Wicaksono, A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Situasional Terhadap Efektivitas Tim Tanggap Darurat Bencana. *Jurnal Kepemimpinan Bencana*, 4(1), 25-35.
- Stogdill, R. M. (1974). *Handbook of leadership: A survey of theory and research*. Free Press.
- Sucipto, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Susilawati, D., & Putra, R. (2017). Koordinasi Lintas Sektor dalam Pemulihan Dini Pascabencana. *Jurnal Pemulihan Pascabencana*, 3(1), 20-30.
- Suwandi, S. (2023). Manajemen Krisis Terkini: Strategi Adaptif Dalam Menghadapi Bencana Dan Tantangan Mendadak. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 473-482.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Widodo, S., & Handayani, T. (2019). Peran Asesmen Lanjutan dalam Perencanaan Pemulihan Pascabencana. *Jurnal Pemulihan Bencana*, 5(1), 10-20.
- Yunus, A. Y., Ahmad, S. N., Latief, R., Mulfiyanti, D., Badrun, B., Syarif, M., ... & Gusty, S. (2024). *Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana*. Tohar Media.
- Chahyadi, M. Z. A. (2025). Responsivitas BPBD pada penanganan tanah longsor di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ilahi, R. (2024). *Responsivitas pelayanan pengaduan tindak pidana kriminal di Kepolisian Sektor Libureng Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar). Universitas Muhammadiyah Makassar.